

PEMANFAATAN REGULASI PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI LANDASAN PROFESIONALISME GURU SD

Nala Zulfia¹, Wina Maisafni Dunita², Desyandri³, Zelhendri Zen⁴
Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang
Email : nalazulfia07@gmail.com¹, Maisafnidunitaw@gmail.com²,
desyandri@fip.unp.ac.id³, zelhendrizen@yahoo.com⁴

ABSTRACT

This study aims to analyze the utilization of basic education regulations as a primary foundation for enhancing teacher professionalism in elementary schools. Teachers hold a strategic role as change agents who determine the success of the learning process and the quality of human resources nationally. However, challenges such as limited 21st-century skills and differing perceptions of policies often hinder the optimization of teacher performance. The method used is a literature review, analyzing secondary data from reputable scientific articles. Analysis results show that education regulations provide a strong legal basis for governing teacher qualifications, certification, and competence. Strengthening professionalism can be achieved by synchronizing regulations with structured academic supervision programs and continuous development within learning communities. The study concludes that the effectiveness of regulations depends heavily on consistent supervision and adequate resource support. Proper policy implementation is proven to contribute significantly to improving the standards of pedagogical, personal, social, and professional competencies of elementary school teachers.

Keywords: *Education Regulation, Teacher Professionalism, Elementary School, Quality of Education.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan regulasi pendidikan dasar sebagai fondasi utama dalam meningkatkan profesionalisme guru di Sekolah Dasar (SD). Guru memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Namun, tantangan seperti keterbatasan keterampilan abad 21 dan perbedaan persepsi terhadap kebijakan seringkali menghambat optimalisasi kinerja guru di lapangan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*literature review*) dengan menganalisis data sekunder dari artikel ilmiah bereputasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi pendidikan memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatur kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi guru. Penguatan profesionalisme dapat dicapai melalui sinkronisasi regulasi dengan program supervisi akademik yang terstruktur dan pengembangan berkelanjutan dalam komunitas belajar. Simpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada pengawasan yang konsisten dan dukungan sumber daya yang memadai. Implementasi kebijakan yang tepat terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan standar kompetensi pendidik sekolah dasar.

Kata Kunci: *Regulasi Pendidikan, Profesionalisme Guru, Sekolah Dasar, Kualitas Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam mencetak generasi berkualitas yang mampu bersaing di kancah global yang semakin kompetitif. Guru di sekolah dasar memegang tanggung jawab besar karena

menjadi peletak dasar kemampuan kognitif dan karakter peserta didik sejak dini. Sebagai garda terdepan, guru dituntut memiliki kompetensi yang selaras dengan dinamika perubahan zaman yang sangat cepat dan kompleks. Regulasi pendidikan hadir untuk memberikan arah dan

kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas profesi pendidik agar tetap pada jalurnya. Keberadaan profesionalisme guru menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, yang akhirnya berperan penting dalam kemajuan pendidikan nasional (Prayoga et al., 2024). Melalui pemanfaatan regulasi yang tepat, profesionalisme guru diharapkan dapat berkembang secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Pengembangan profesionalisme guru di tingkat dasar bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif semata, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjamin mutu. Guru yang profesional wajib menguasai empat kompetensi utama, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai standar yang ditetapkan negara. Regulasi nasional telah mengatur standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif di kelas. Namun, dalam realitasnya, masih banyak guru yang menghadapi kendala dalam mengintegrasikan regulasi tersebut ke dalam praktik instruksional harian. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada keahlian guru dalam peran mereka sebagai penggerak perubahan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan siswa (Siburian & Naibaho, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana regulasi pendidikan dapat benar-benar menjadi penggerak utama profesionalisme guru SD.

Salah satu regulasi fundamental di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang Guru dan Dosen secara menyeluruh. Undang-undang ini secara eksplisit mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan kualifikasi akademik yang harus diakui secara sah oleh negara. Kebijakan sertifikasi guru diperkenalkan sebagai bentuk pengakuan atas profesionalitas sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik di sekolah. Meskipun

kebijakan ini memberikan harapan baru, implementasinya seringkali dihadapkan pada tantangan birokrasi dan perbedaan kualitas sumber daya di daerah. Kebijakan pendidikan di Indonesia telah memberikan landasan hukum dan regulasi yang kuat untuk pengembangan profesionalisme guru melalui standar kualifikasi (Sari et al., 2025). Tanpa adanya sinkronisasi regulasi yang baik, tujuan mencetak guru profesional di seluruh pelosok negeri akan sulit dicapai optimal.

Supervisi akademik merupakan instrumen regulasi yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja guru secara periodik di sekolah. Melalui supervisi yang terstruktur, pengawas sekolah dapat mengidentifikasi kelemahan dan memberikan solusi praktis bagi pengembangan profesionalitas guru di lapangan. Regulasi mengharuskan pelaksanaan supervisi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk menjaga standar mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan. Sayangnya, pelaksanaan kegiatan ini di lapangan seringkali dianggap sebagai beban formalitas oleh sebagian tenaga pendidik yang kurang memahami esensinya. Supervisi pendidikan memainkan peran sentral dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara menyeluruh (Suparti et al., 2025). Diperlukan perubahan paradigma agar supervisi dipandang sebagai proses pengembangan profesional yang suportif bagi guru dan bukan ancaman.

Penerapan kode etik guru juga menjadi bagian integral dari regulasi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pendidik profesional di Indonesia. Kode etik memberikan standar perilaku yang mendorong guru untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi kepada masyarakat. Dalam konteks profesionalisme, kepatuhan terhadap nilai-nilai etis ini sama pentingnya dengan

penguasaan materi pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Lemahnya pengawasan terhadap implementasi kode etik seringkali menyebabkan penurunan martabat profesi guru di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan kode etik profesional harus mendukung profesionalisme ini karena memberikan standar etis yang mendorong guru bertindak dengan integritas (Siburian & Naibaho, 2025). Regulasi yang kuat harus didukung oleh sistem penghargaan dan sanksi yang jelas bagi mereka yang mematuhi atau melanggar standar.

Keterampilan abad 21, termasuk literasi digital dan berpikir kritis, kini menjadi poin penting dalam regulasi pengembangan guru di era modern. Guru SD dituntut untuk tidak hanya sekadar mengajar, tetapi juga mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Regulasi pendidikan dasar di masa depan akan semakin fokus pada kemampuan adaptasi guru terhadap ekosistem digital yang terus berkembang pesat. Beberapa faktor penghambat profesionalisme termasuk keterbatasan dalam mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital (Meyvita et al., 2025). Keterbatasan dalam pengembangan keterampilan ini masih menjadi hambatan utama bagi banyak guru, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil. Profesionalisme di era digital berarti guru harus mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat yang terbuka terhadap setiap bentuk inovasi teknologi.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kepala sekolah sebagai manajer, dan guru sebagai pelaksana harus memiliki visi dan misi yang sejalan. Regulasi tidak akan memberikan dampak signifikan tanpa didukung oleh alokasi sumber daya yang tepat dan pembinaan yang dilakukan secara intensif. Penilaian kinerja guru adalah suatu dasar atau landasan sekolah demi membuat

keputusan pengembangan dalam promosi dan karir guru (Munawir et al., 2023). Peningkatan kualitas profesi guru pada akhirnya adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perbaikan sistem manajemen dan regulasi guru di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi pustaka atau sering disebut sebagai literature review. Fokus utama penelitian adalah menganalisis berbagai kebijakan dan regulasi pendidikan dasar yang berhubungan langsung dengan upaya penguatan profesionalisme guru SD. Data diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap artikel ilmiah dari database jurnal bereputasi yang dipublikasikan dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka menggunakan sumber data sekunder dari artikel dan jurnal (Sari et al., 2025).

Prosedur analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan memverifikasi informasi yang relevan dari dokumen-dokumen yang telah dipilih sebelumnya secara teliti. Peneliti melakukan sintesis terhadap temuan-temuan dari berbagai studi literatur untuk melihat pola pemanfaatan regulasi dalam praktik pendidikan sehari-hari di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan literature review dengan menggunakan sebuah data dari berbagai sumber jurnal yang bersifat relevan dengan topik (Hidayat & Adri, 2024). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif tanpa harus melakukan pengumpulan data primer langsung di lapangan.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil penelitian dari berbagai penulis dan konteks sekolah yang berbeda di Indonesia. Proses analisis akhir bertujuan untuk menarik simpulan yang dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pengembangan profesi guru sekolah dasar di masa depan. Metodologi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas regulasi pendidikan sebagai instrumen penguatan profesionalisme pendidik secara yuridis dan praktis. Penelitian ini mengkaji implementasi program supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di sekolah dasar melalui analisis sistematis berbagai studi (Suparti et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi pendidikan di Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang sangat komprehensif bagi perlindungan dan pengembangan profesi guru. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tetap menjadi acuan utama dalam menetapkan standar kualifikasi akademik minimal yang harus dimiliki setiap guru. Profesionalisme guru sekolah dasar diukur melalui perbandingan kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki oleh tenaga pendidik di suatu wilayah tertentu (Hidayat & Adri, 2024). Namun, distribusi guru berkualifikasi tinggi masih belum merata antara daerah perkotaan dan perdesaan yang memerlukan perhatian serius pemerintah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa regulasi memerlukan dukungan kebijakan turunan yang lebih fokus pada aspek pemerataan kualitas di seluruh Indonesia.

Supervisi pendidikan merupakan instrumen regulasi yang terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan pedagogik guru jika dijalankan dengan benar dan konsisten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa supervisi yang

terstruktur dan berbasis kolaboratif dapat meningkatkan keterampilan pedagogik serta motivasi guru secara signifikan (Suparti et al., 2025). Namun, kendala utama yang sering muncul adalah adanya perbedaan persepsi antara pengawas sekolah dan guru mengenai esensi tujuan supervisi. Pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah pada beberapa sekolah dasar ditemukan belum maksimal dalam meningkatkan profesionalisme guru secara nyata (Rangkuti et al., 2021). Regulasi perlu mempertegas peran pengawas sebagai mentor yang mendampingi pengembangan kompetensi guru dan bukan sekadar pemeriksa dokumen administratif.

Kompetensi profesional guru SD sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan diri yang difasilitasi oleh pemerintah maupun inisiatif dari satuan pendidikan masing-masing. Program-program pelatihan yang terintegrasi dengan teknologi informasi mulai banyak diimplementasikan untuk menjawab tuntutan zaman yang semakin dinamis dan serba digital. Penguatan kompetensi profesional dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, integrasi teknologi, dan kolaborasi antar pendidik dalam komunitas belajar yang aktif (Meyvita et al., 2025). Guru yang secara aktif mengikuti kegiatan pengembangan di komunitas belajar seperti KKG cenderung memiliki kinerja yang jauh lebih inovatif. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghambat utama bagi pelaksanaan pelatihan yang berkualitas tinggi dan menjangkau seluruh guru.

Penilaian Kinerja Guru (PKG) merupakan regulasi yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan terkait sistem promosi dan jenjang karier tenaga pendidik profesional. PKG mengukur sejauh mana guru menguasai kompetensi dasar dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai pengajar, pembimbing, sekaligus pelatih bagi siswa.

Tujuan dari penilaian kinerja adalah guna mengerti terkait pengertian dan kompetensi yang bisa dipakai untuk mengevaluasi kinerja guru (Munawir et al., 2023). Melalui penilaian yang objektif, sekolah dapat memetakan kebutuhan pembinaan bagi masing-masing individu pendidik agar tepat sasaran sesuai dengan kekurangannya. Namun, objektivitas penilaian seringkali diragukan jika prosesnya tidak dilakukan oleh penilai yang benar-benar kompeten dan bertindak secara independen.

Kode etik guru yang diatur secara nasional merupakan batasan regulatif yang menjaga martabat, kehormatan, dan integritas pendidik di mata masyarakat luas. Implementasi kode etik di sekolah dasar sangat krusial karena guru berfungsi sebagai figur teladan utama bagi pembentukan karakter awal para siswa. Studi menunjukkan bahwa kode etik sangat penting untuk meningkatkan lingkungan pendidikan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru (Siburian & Naibaho, 2025). Meskipun demikian, kasus pelanggaran etika masih sering terjadi akibat kurangnya pengawasan yang ketat dari organisasi profesi maupun pihak sekolah. Regulasi yang ada harus dibarengi dengan penegakan sanksi yang tegas demi menjaga marwah profesi kependidikan dari tindakan yang tidak terpuji.

Integrasi teknologi dalam regulasi pendidikan dasar menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari seiring dengan terjadinya transformasi digital di segala lini kehidupan. Kebijakan pendidikan saat ini mendorong guru untuk memanfaatkan berbagai media pembelajaran berbasis IT guna meningkatkan efektivitas dan daya tarik pengajaran. Profesionalisme guru di era ini diukur dari kemampuannya mengelola literasi digital dan menyajikannya dalam bentuk pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Kualitas pendidikan yang tinggi dapat dicapai melalui pemenuhan standar kompetensi guru yang mencakup

penguasaan teknologi informasi secara mumpuni (Prayoga et al., 2024). Tantangannya adalah masih adanya jurang digital di mana tidak semua guru memiliki akses dan keterampilan yang setara terhadap perangkat teknologi.

Pemanfaatan regulasi pendidikan dasar sebagai landasan profesionalisme juga berkaitan erat dengan sistem kesejahteraan dan penghargaan bagi guru yang berprestasi. Kebijakan tunjangan profesi bagi guru yang telah bersertifikat merupakan bentuk apresiasi nyata negara terhadap dedikasi dan pengabdian yang telah mereka berikan. Regulasi kebijakan pendidikan mengatur mengenai kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, serta dukungan anggaran yang dialokasikan khusus untuk para tenaga pendidik (Sari et al., 2025). Harapannya, dengan kesejahteraan yang terjamin, guru dapat fokus sepenuhnya pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas tanpa beban finansial. Namun, tuntutan administratif yang menyertai pencairan tunjangan tersebut seringkali dikeluhkan karena dianggap terlalu menyita waktu produktif guru.

KESIMPULAN

Regulasi pendidikan dasar merupakan fondasi yuridis yang sangat krusial dalam mengarahkan dan memperkuat profesionalisme guru di seluruh wilayah Indonesia secara konsisten. Melalui instrumen kebijakan seperti kualifikasi akademik, sertifikasi, supervisi akademik, dan kode etik, standar kompetensi guru dapat terus ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemanfaatan regulasi yang efektif terbukti mampu mendorong guru untuk menjadi lebih inovatif, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan pendidikan di abad 21 yang serba digital. Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini masih dibayangi oleh tantangan klasik berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum merata.

Untuk mengoptimalkan peran regulasi sebagai landasan profesionalisme, diperlukan komitmen yang kuat dalam hal pengawasan yang konsisten dan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah harus terus ditingkatkan guna memastikan pemerataan kualitas guru di seluruh jenjang pendidikan dasar tanpa terkecuali. Selain itu, program pengembangan kompetensi guru harus lebih difokuskan pada kebutuhan riil di lapangan, terutama dalam hal penguasaan teknologi pembelajaran yang mutakhir. Dengan pemanfaatan regulasi yang tepat dan dukungan ekosistem pendidikan yang kondusif, profesionalisme guru SD akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan kualitas pendidikan nasional yang unggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, M. S., & Adri, H. T. (2024). Profesionalisme Guru Sekolah Dasar: Perbandingan Kualifikasi Dan Sertifikasi Guru (Studi Literature Data Di Kabupaten Cianjur Dan Kabupaten Bandung Jawa Barat). *Didaktik Global: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 1(1), 44–60.
- Meyvita, I., Azizah, A. N., Alya, J., Agetta, Y. M., & Zulfadewina, Z. (2025). Membangun Kompetensi Profesional Guru Sekolah Dasar Dalam Menyambut Pendidikan Berkualitas. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 210–225.
- Munawir, Yasmin, A., & Wadud, A. J. (2023). Memahami Penilaian Kinerja Guru. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1b), 727–735.
- Prayoga, F. I., Masruroh, N., & Safitri, N. V. (2024). Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3), 613–622.
- Rangkuti, N. A., & Pratiwi, S. N. (2021). Supervisi Akademik Bagi Pengembangan Profesionalisme Guru Studi Pada Sekolah Dasar Di Kota Medan, Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi (JMP-DMT)*, 2(3), 3856–3870.
- Rangkuti, N. A., Aktar, S., & Prasetya, I. (2021). Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Al-Fauzi Medan. *Jurnal EduTech*, 7(1), 2587–2603.
- Sari, P. M., Najib, K. A., & Hadi, A. (2025). Peran Kebijakan Pendidikan dalam Pengembangan Kualitas Profesi Guru di SD Negeri Wonorejo. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 259–267.
- Siburian, E. B., & Naibaho, D. (2025). Profesionalisme Guru Dalam Menjunjung Nilai Kode Etik Sebagai Landasan Pendidikan Berkualitas. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(1), 2255–2267.
- Suparti, S., Zahro, N. H., Sutopo, A., & Narimo, S. (2025). Implementasi Program Supervisi Pendidikan Untuk Pengembangan Profesionalisme Guru Di Sekolah Dasar: Sebuah Kajian Literatur. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 1175–1191.